



# Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke

Novita Benedikta Sawi

Universitas Musamus, Indonesia

\*Korespondensi : nsawi@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah ada pengaruh antara variabel penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan budaya organisasi pun memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

**Kata kunci :** Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budaya Organisasi, Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

*Abstract: This study aims to analyze the influence of participation in budgeting and organizational culture on the performance of local government officials. So the problem in this study is whether there is an influence between the variables of budgeting and organizational culture on the performance of local government officials. The results of the study prove that participation in budgeting has a significant effect on the performance of local government officials and organizational culture also has a significant effect on the performance of local government officials.*

*Keywords: participation in budgeting, organizational culture on the performance, local government officials.*

## 1. PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintah atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan ide baru atau masukan. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dimana masing-masing pihak memainkan peran mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan anggaran. Anggaran yang dihasilkan digunakan sebagai tolak ukur para manajer dan para pegawai proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan.

Pemerintah daerah menjadi salah satu organisasi sektor publik yang dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian

tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang di berikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Peningkatan kinerja aparat pemerintah merupakan hal komprehensif dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/kantor) akan menghasilkan tingkat kerja yang berbeda beda-sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Wulandari (2013) mengungkapkan, peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang sangat penting dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda. Agar anggaran tepat sasaran diperlukan kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan dalam penyusunan anggaran yang dinamakan partisipasi anggaran.

Sebagai organisasi sektor publik Dinas Pendidikan kabupaten Merauke sangat dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong dinas tersebut untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan upaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada Dinas Pendidikan tersebut. Penyusunan anggaran dalam Dinas Pendidikan harus benar-benar memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan Dinas Pendidikan dan masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Untuk itulah diperlukan informasi yang benar-benar akurat dalam penyusunan anggaran Dinas Pendidikan, jangan sampai usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat tidak terkomendasikan dalam anggaran.

Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya yang tidak hanya di pengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya. Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pada instansi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, salah satu indikator penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah implikasinya terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **2.1 Pengertian Partisipasi**

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi ia menentukan dirinya dengan atau kelompok, melalui berbagai proses dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab Bersama.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional,

dimana para individu terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut (Kurniawan, 2013). Partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam menentukan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya atau penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk bekerja sama menentuka rencana.

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagai tanggungjawab bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga sisi psikologis yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap memiliki seseorang dalam pengambilan keputusan (Anthony dan Govindarajan, 2013).

Sementara Lubis (2010) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja.

## 2.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis meliputi kegiatan perusahaan dalam satuan keuangan adan untuk jangka waktu satu tahun menurut Beby Natalya (2013). Dalam suatu organisasi, anggaran merupakan elemen penting. Dalam suatu organisasi anggaran dibutuhkan untuk membuat stategi ke dalam rencana dan tujuan baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Wardani dan Surdayati , 2015).

Penyusunan anggaran pada sektor publik harus di awasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif apabila diawasi oleh Lembaga pengawas khusus (oversight body) yang memiliki tugas untuk mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengertian anggaran sektor publik menurut Bastian (2013) yaitu “ Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Hal ini dapat di simpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang direpresentasikan dalam bentuk rencana dan pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

Menurut Hahmudi (2019) mengatakan bahwa anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusu alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Penyusunan anggaran pada sektor publik harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif apabila diawasi Lembaga pengawas khusus (oversight body) yang memiliki tugas untuk mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran merupakan salah satu instrument yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik sendiri harus bersifat partisipasi organisasi yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuah publik dapat diakomodasikan dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan

### 2.3 Partisipasi penyusunan anggaran

Partisipasi anggaran merupakan salah satu pendekatan bottom-up dalam proses penyusunan anggaran, dimana aliran dana anggaran dalam suatu system partisipasi berawal dari tingkat tanggungjawab yang lebih rendah kepada tingkat tanggungjawab yang lebih tinggi. Setiap orang yang mempunyai tanggungjawab atas pengendalian biaya atau pendapatan harus menyusun estimasi anggarannya dan menyerahkannya kepada tingkat manajemen yang paling tinggi.

Menurut Garrison (2013) mengartikan anggaran partisipasi merupakan anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala tingkatan. Mengingat anggaran disusun bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya, maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap manajer sehingga menghasilkan goal congruence yang lebih besar. Adanya partisipasi mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Menurut Mowen (2013) mendefinisikan bahwa partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas anggaran, untuk berpartisipasi dalam perkembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para menejer tingkat bawah dan mendorong kreativitas.

Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran. Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD ( masing-masing instansi/ dinas/ kantor) membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada kepala bagian, kepala bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah bersama DPR membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang telah ditentukan dibuat sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

## 3 METODOLOGY

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013) Jenis penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numberik (angka) yang dapat diberikan menjadi data interval dan data rasio.

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan (Kasmadi & Sunariah, 2016). Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Alasan dipilihnya populasi dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Menurut Kasmadi dan Sunariah, (2016) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala/ Ketua/ Direktur, Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Kasubbag/ Kasubbid), Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas.

#### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1), budaya organisasi (X2), secara parsial atau masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai (Y).

Tabel 1 Hasil Uji Parsial / Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	16.972	2.856		5.943	.000	
PPA	.180	.183	-.170	3.983	.032	.885
BO	.224	.144	.270	4.560	.028	.885

Sumber: Hasil uji spss

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1), budaya organisasi (X2), secara Bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai (Y).

Tabel. 2 Hasil Uji Simultan / Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.119	2	7.059	1.334	.0277 <sup>b</sup>
Residual	185.276	35	5.294		
Total	199.395	37			

Sumber: Hasil uji spss

Determinan ( $R^2$ ) atau R-Square digunakan untuk melihat beberapa besar variabel independent maupun menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1), dan budaya organisasi (X2) dapat menjelaskan variabel kinerja pegawai.

Tabel. 3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.266 <sup>a</sup>	.071	.518	2.301

Sumber: Hasil uji spss

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran (X1) dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

#### 4.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) variabel penyusunan anggaran memiliki nilai koefisien sebesar 3.983 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,032. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini berarti pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke signifikan atau ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Merauke.

Hal ini sependapat dengan penelitian Selmita Panoan (2013) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran berpengaruh positif atau signifikan dalam menunjang

kinerja aparatur pemerintah daerah, selain itu partisipasi juga dianggap sebagai sarana aktualisasi yang baik untuk para pegawai dalam rangka meningkatkan diri mereka kepada masing-masing tanggungjawab atau tugas yang di berikan kepada mereka.

Pentingnya partisipasi pegawai dalam anggaran juga meningkatkan efisiensi pemerintah Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada efisiensi, seperti sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil dari hasil kerja atau skema alokasi harga sasaran. Ini akan membantu pemerintah daerah mencapai target APBD setiap tahun dengan partisipasi sumber anggaran yang dibuat oleh anggaran dari banyak pegawai terkait dalam hal ini. Sebagaimana diketahui semua orang, partisipasi pegawai dalam anggaran merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu perencanaan jangka pendek dan pengendalian atas organisasi, yaitu anggaran. Sedangkan anggaran adalah pernyataan tentang kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dipublikasikan secara finansial, itu adalah proses atau metode untuk menyusun anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk dipublik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan melaksanakan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sehingga dengan keterlibatan atau partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran menjadi alat pengendalian atas pengelolaan dana publik.

Anggaran yang disiapkan memiliki peran dalam kriteria perencanaan dan kinerja, karena anggaran digunakan sebagai sistem kendali untuk mengukur kinerja manajerial. Anggaran peserta mengacu pada sejauh mana seorang pegawai berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan mempengaruhi tujuan anggaran di setiap pusat yang bertanggung jawab. Berpartisipasi dalam penetapan tujuan anggaran yang mendorong pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan berpartisipasi dalam tindakan.

Alasan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran maka semakin baik kinerja pegawainya, tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh secara positif terhadap siap pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kerja, dan meningkatkan kerja sama diantara atasan yang berdampak pada peningkatan kinerja.

#### **4.2 Pengaruh Budaya Organisasi (X2) Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y).**

Berdasarkan pada uraian diatas menunjukkan pentingnya budaya organisasi yang positif terus dipertahankan dan dilakukan guna mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah. Karena pencapaian target kinerja berperan penting dan harus didukung oleh beberapa indikator seperti partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan untuk meningkatkan kinerja yang mendorong efektifitas organisasi, karena dengan adanya partisipasi diperoleh komunikasi antara atasan dan bawahan saling memberikan informasi terutama bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagian/bidangnya, sehingga penyusunan anggaran yang disebut sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Sedangkan partisipasi merupakan suatu perilaku, pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung, artinya bahwa keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran misalnya pemimpin atau kepala dinas sebagai penentu alokasi penyusunan anggaran, bendahara sebagai

pelaksana yang mengatur sistem keuangan berdasarkan perintah atasan, dan kepala bagian dan sub bagian menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sehingga mendorong kinerja yang terarah.

Salah satu peningkatan kinerja pegawai pemerintah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi yang akan dicapai, tentunya harus didukung sumber daya berkualitas. Disinilah peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, dalam artian memiliki kompetensi dibidangnya yakni dengan latar belakang Pendidikan yang memadai, keterampilan dan perilaku. Terbangunnya budaya organisasi yang berlandas pada rasa kepercayaan, keterlibatan dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasi, sebagai wujud profesionalisme dan tanggung jawab aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan yang dapat ditunjang pada partisipasinya untuk membantu, mengawasi, mengelola, dan menyusun anggaran daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara persial (uji t) variabel budaya organisasi memiliki nilai koefisien sebesar 4.560. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,028. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke signifikan adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Merauke.

Hal ini sepadan dengan Jannah (2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening . Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan pusat dari semua penyebab yang bersumber dari pengelolaan sumber daya manusia. Budaya organisasi di yakini dapat mempengaruhi sikap pribadi terhadap hasil, seperti Komitmen, motivasi, moral dan kepuasan.

Alasan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai adalah suatu organisasi dengan budaya yang kuat maka akan mempengaruhi perilaku dan efektifitas kinerja pegawai. Kualitas kinerja pegawai akan sebanding dengan kualitas budaya organisasinya baik maka kinerja pegawai pun akan baik begitu pula sebaliknya.

#### **4.3 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) dan Budaya Organisasi (X2) Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y).**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah maka disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan untuk partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah pada organisasi dinas Pendidikan kabupaten Merauke. Budaya organisasi memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah dinas Pendidikan kabupaten Merauke. Desain pola penyelenggaraan partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi dengan cara meningkatkan tingkat partisipasi pegawainya. Pemimpin organisasi dinas Pendidikan kabupaten Merauke, sebagai kuasa pengguna anggaran hendaknya melibatkan peran bawahan (kepala bidang) dalam proses penyusunan anggaran karena bawahan merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program yang dilaksanakan oleh organisasi dinas Pendidikan kabupaten Merauke.

Hal ini sepadan dengan penelitian (Aryanda 2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi memperlemah hubungan penganggaran partisipasi terhadap kinerja manajerial, hasil ini menjelaskan bahwa budaya organisasi di lingkungan pemerintah memiliki kecenderungan untuk mengikuti perintah atasan atau pimpinan dari pada usaha untuk berinisiatif dalam melakukan sebuah pekerjaan. Alasan partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ada di dalam dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Karena semakin baik tingkat partisipasi pegawai dan tingkat budaya organisasi pada dinas Pendidikan maka semakin baik pula kinerja pegawainya yang ada pada instansi tersebut.

## **5 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka pada penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Partisipasi penyusunan anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada dinas pendidikan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Merauke.
- b) Budaya organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Merauke.
- c) Dan secara simultan partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Merauke.

## **6 DAFTAR PUSTAKA**

- Wati, 2008, "Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Tanah Datar) Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang."
- Pertiwi Putri, 2012, "Pengaruh budaya organisasi dan pemberdayaan terhadap komitmen Agusti Restu, 2012, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan budaya organisasi, Jurnal Ekonomi."
- Soleman Rusman, 2012, "Pengaruh penganggaran partisipasi terhadap kinerja manajerial dengan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan budaya, Jurnal Siasat Bisnis."
- Rasmi, 2012, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen individu terhadap kinerja manajerial pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Jurusan akuntansi, Universitas Musamus."
- Rahmatioko, 2013, "Pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Merauke: Budaya organisasi sebagai variabel intervening. Jurusan Akuntansi, universitas Musamus." organisasi dalam meningkatkan kinerja, Universitas Dian Nusantara Semarang."
- Hayon, P., & Fitry, R. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua. *Musamus Accounting Journal*, 6(2), 39-48. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i2.6168>
- Kurniawan Muhammad, 2013, "Pengaruh komitmen organisasi budaya dan keputusan kinerja terhadap kinerja organisasi publik, Studi empiris SKPD Kabupaten Kerinci."
- Amri Nofisa Vonny, 2014, "Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, Kabupaten Sijunjung."

- Mbola M. S. Y. Anastasia, 2015, "Skripsi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai, Universitas Musamus Merauke."
- Mandawa, M. M. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keperilakuan Organisasi Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Musamus Accounting Journal*, 6(1), 43-53. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i1.6262>
- Wahyu Evi, 2015, "Pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, Kota Tasikmalaya."
- Eka Kristiastanti, 2018, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah".
- Jenita Sumari, 2020, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai variable mediasi, di Kabupaten Intan Jaya".
- Firdayanti, 2020, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah enrekang".
- Romdioni, A. N., Ulita, A. S., Hiktaop, K., Herdjiono, M. V. I., Hayon, P. P., & Kadir, A. R. (2020). Fiscal decentralization and regional income: evidence from Papua province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 12079. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012079>